

PERAN BAPPEDA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN SANITASI DI DESA JAMBU KABUPATEN SEMARANG.

Oleh :

Rahardian Tetra Andrianto – 14010112140131

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro Semarang

Jalan Prof. H. Soedarto. SH, Tembalang, Semarang. Kode Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id>/Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research conducted to explain the result from the role of Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Semarang Regency and participation of society in sanitation development implementation in Jambu Village, Semarang Regency. The purposes of the research are society welfare enhancement through a planned effort, do an evaluation of accountable region development plan, do an assesment of region development potential analytically, do coordination of integrated planning, and do administration BAPPEDA Semarang Regency. This research is helpful for monitoring and evaluating implementation of sanitation development plan in Jambu Village including to assure policy, program, and project are implemented accordance with the determinded plan, and also to obtain feedback from policy, program, and project that is done as well as in progress.

This research used qualitative descriptive method which supported by quantitative data and particularly used mix method research focused on purposive sampling technique to explain the role of BAPPEDA and participation of society in sanitation development implementation. Source of data were primary and secondary data. Collection of the data used observation, interview, and literature review.

The result shows that implementation of sanitation development in Jambu Village Semarang Regency has worked well. The positive effect of this policy has achieved proved by society utilize irrigation canal easily for daily life, perceive 'gotong-royong' to other society, and easily get clean water so they have assured health and well field watering. The exist of sanitation development program in Jambu Village is expected affect to better social-economic and physic condition for society thus farmer's income will increase.

Key words: village development, sanitation development, society's participation, and the role of BAPPEDA

I. PENDAHULUAN

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses multidimensial yang meliputi perubahan struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam kelembagaan (institusi) nasional. Permasalahan pokok yang ada dalam pembangunan suatu daerah terletak pada penetapan prioritas kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan agar pelaksanaan pembangunan daerah menuju kepada pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru serta merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (perdesaan) merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksan akan. Anggaran dana pembangunan yang tersedia adalah relatif terbatas sedangkan program/proyek pembangunan yang dibutuhkan (yang telah direncanakan) jumlahnya relatif banyak, maka perlu dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat untuk menunjang implementasi pembangunan program/proyek dalam masyarakat.

Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (*social empowerment*) secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat (perdesaan). Dengan adanya partisipasi masyarakat, Program Pembangunan akan menjadi lebih terarah, artinya program disusun sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, berarti dalam penyusunan program dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasar besar kecilnya tingkat kepentingannya), dengan demikian pelaksanaan Program Pembangunan dipedesaan akan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.

Penelitian ini menyoroti mengenai pembangunan desa di desa Jambu Kabupaten Semarang. Pembangunan di Desa Jambu yang telah berlangsung adalah pembangunan sanitasi. Pembangunan sanitasi merupakan satu satu pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional mempunyai arti yang strategis, di daerah pedesaan.

Sanitasi yang meliputi pelayanan air limbah, persampahan, drainase, kesehatan dan kebersihan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dan merupakan tanggung

jawab bersama. Namun pertumbuhan kebutuhan akan pelayanan sanitasi seiring dengan perkembangan penduduk saat ini semakin sulit dikejar dan dipenuhi.

II. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam karya ilmiah skripsi ini akan dipaparkan Uji Instrumen Penelitian, tentang pembangunan sanitasi, Peran Bappeda dalam pembangunan sanitasi di desa Jambu dan Partisipasi masyarakat sanitasi di desa Jambu serta pembahasan.

2.1 Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Pengujian tingkat validitas tiap item dipergunakan analisis item, artinya mengkorelasikan skor tiap item dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor item. Validitas instrumen merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Adapun hasil mengenai tingkat validitas butir pernyataan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Hasil Uji Validitas

Variabel	r hitung	r tabel	Keterangan
Perencanaan	0.684	0.4124	Valid
	0.513	0.4124	Valid
	0.412	0.4124	Valid
	0.412	0.4124	Valid
	0.400	0.4124	Valid
Pelaksanaan	0.656	0.4124	Valid
	0.656	0.4124	Valid
	0.447	0.4124	Valid
Evaluasi	0.555	0.4124	Valid
	0.583	0.4124	Valid
	0.591	0.4124	Valid

Sumber : data yang diolah, 2017

2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas menunjukkan pada sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten dan dilakukan kembali terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang sama. Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius. Artinya, bahwa instrumen tersebut secara alamiah tidak akan mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel, akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Apabila data yang diambil memang benar-benar sesuai dengan fakta, maka berapa kali pun data tersebut diambil akan tetap menunjukkan hasil yang sama.

Tabel 2.2
Uji Reliabilitas

Indikator	Nilai Alpha	Alpha standart	Keterangan
Perencanaan	0.654	0,6	Reliabel
Pelaksanaan	0.677	0,6	Reliabel
Evaluasi	0.655	0,6	Reliabel

Sumber : data yang diolah, 2017

Pada tabel 2.2 di atas dapat disimpulkan bahwa pengujian reliabilitas terhadap semua variabel penelitian dalam penelitian ini dinyatakan reliabel, di mana nilai alpha hitung lebih besar dari alpha standar (0,6). Sehingga instrumen dalam penelitian ini dapat diandalkan dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dan sekaligus secara alamiah tidak akan mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu.

2.2 Pembangunan Sanitasi

Visi dan Misi pembangunan sanitasi Kabupaten Semarang, salah satunya dilaksanakan oleh pemerintah desa Kabupaten Jambu lewat hasil keputusan Musrembang yaitu pembangunan sanitasi. Pembangunan sanitasi dari BAPPEDA kepada desa Jambu salah satunya adalah

1. Sarana dan prasarana air bersih
2. Dan perbaikan air bersih

Alur keputusan pembangunan sanitasi dari BAPPEDA dimulai dari musyawarah perencanaan dan pembangunan (Musrenbang) pada hakikatnya adalah forum perencanaan

pembangunan formal yang berusaha mempertemukan aspirasi masyarakat dari bawah dengan usulan program pembangunan dari instansi pemerintah. Pembangunan sanitasi di desa Jambu sendiri antara lain meliputi : Sarana dan Prasarana Air Bersih Yang berlokasi di Jambu LOR RT 04 /RW 01 Desa Jambu Kecamatan Jambu tahun anggaran 2016 yang menelan biaya anggaran Rp. 10.000.000. Perbaikan Saluran Irigasi 100 m² Perbaikan saluran irigasi dengan panjang 100m² ini berlokasi di Di Jambu Lor RT 05 / RW 01 Desa Jambu Kecamatan Jambu, tahun anggaran 2016 yang menelan anggaran sebesar 14.000.000

Monitoring pelaksanaan pembangunan sanitasi diatas dilakukan sebelum dan sesudah proyek selesai, yang dimaksudkan adalah sebelum dan sesudah proyek pembangunan selesai BAPPEDA mengecek bahan, tenaga yang mengerjakan, estimasi waktu serta pengawasan terhadap biaya pelaksanaan oleh tim-tim khusus dari BAPPEDA sesuai kebutuhannya.

2.3 Peran BAPPEDA dalam pembangunan sanitasi di desa Jambu

1. Peran BAPPEDA dalam Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari sistem pembangunan daerah yang berfungsi sebagai pengarah yang memberikan rambu-rambu kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan pembangunan secara bertahap.

Adanya perencanaan disebabkan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi sehingga diperlukan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai kegiatan yang harus segera dilakukan yang sifatnya mendesak. Oleh karena tahap perencanaan menentukan tingkat keberhasilan pembangunan, maka BAPPEDA harus mampu menangkap isu strategis maupun permasalahan yang ada baik permasalahan sektoral maupun daerah.

Perencanaan pembangunan sanitasi di desa Jambu BAPPEDA dimulai dari hasil Musrenbang Kecamatan yang merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari desa/kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintasdesa/kelurahan di kecamatan yang bersangkutan. Sesuai dengan tujuan Musrenbang, yaitu menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat dari musyawarah perencanaan ditingkat dibawahnya. Dari hasil musrenbang pembangunan sanitasi amat dibutuhkan di Desa Jambu terutama yang terkait dengan pengadaan air bersih dan juga perbaikan saluran irigasi. Dalam

perencanaan pembangunan daerah ada beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian agar perencanaan pembangunan dapat menghasilkan rencana pembangunan yang baik serta dapat diimplementasikan di lapangan, antara lain: 1. Aspek lingkungan 2. Aspek potensi dan masalah 3. Aspek institusi perencana 4. Aspek ruang dan waktu 5. Aspek legalisasi kebijakan Dalam proses pembangunan daerah dapat dilihat dengan tiga cara pandang yang berbeda.

Dalam proses musrenbang dokumen BAPPEDA dan masyarakat antara lain dijabarkan sebagai berikut :

Dalam perencanaan musrenbang untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Penyusunan dokumen RKP Desa selalu diikuti dengan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), karena suatu rencana apabila tanpa anggaran sepertinya akan menjadi dokumen atau berkas belaka. Kedua dokumen ini tidak terpisahkan, dan disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat. RKP Desa dan APB Desa merupakan dokumen dan informasi publik. Pemerintah desa merupakan lembaga publik yang wajib menyampaikan informasi publik kepada warga masyarakat. Keterbukaan dan tanggung gugat kepada publik menjadi prinsip penting bagi pemerintah desa.

RKP Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa dan disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tahunan atau biasa disebut musrenbang Desa. Dokumen RKP Desa kemudian menjadi masukan (input) penyusunan dokumen APB Desa dengan sumber anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PA Desa), swadaya dan partisipasi masyarakat, serta sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat. Proses penyusunan dokumen RKP Desa dapat dibagi dalam tiga tahapan, tahapan tersebut adalah :

1. Tahap Persiapan Musrenbang Desa,

Merupakan kegiatan mengkaji ulang dokumen RPJM Desa, mengkaji ulang dokumen RKP Desa tahun sebelumnya, melakukan analisa data dan memverifikasi data ke lapangan bila diperlukan. Analisis data yang dilakukan seringkali disebut sebagai “analisis kerawanan desa” atau ”analisis keadaan darurat desa” yang meliputi data KK miskin, pengangguran, jumlah anak putus sekolah, kematian ibu, bayi dan balita, dan sebagainya. Hasil analisis ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan penyusunan draft rancangan awal RKP Desa dan perhitungan anggarannya.

2. Tahap Pelaksanaan Musrenbang Desa

Merupakan forum pertemuan warga dan berbagai pemangku kepentingan untuk memaparkan hasil “analisis keadaan darurat/kerawanan desa”, membahas draft RKP Desa, menyepakati kegiatan prioritas termasuk alokasi anggarannya. Pasca Musrenbang, dilakukan kegiatan merevisi RKP Desa berdasarkan masukan dan kesepakatan, kemudian dilakukan penetapan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa.

3. Tahap Sosialisasi

Merupakan sosialisasi dokumen RKP Desa kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Dokumen RKP Desa selanjutnya akan menjadi bahan bagi penyusunan APB Desa. RKP Desa dan APB Desa wajib dipublikasikan agar masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan dan melakukan pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaannya.

Kegiatan ini melibatkan kepala dusun, pemuda dan perempuan. Hasilnya didampingi dengan data tahun lalu, untuk dianalisa dan dicari program apa yang lebih baik dilanjutkan, ditambah, dikurangi, dan sebagainya. Jadi, sifat dokumen RPJM Desa tidaklah “harga mati” tetapi juga bukan berarti dengan mudah diubah/diganti program maupun kegiatannya. Berdasarkan hasil musrenbang dengan menganalisis tingkat kebutuhan masyarakat, lingkungan dan lainnya BAPPEDA menetapkan anggaran pembangunan untuk proram pembangunan sanitasi di Desa Jambu dalam proses perencanaan pembangunan sanitasi BAPPEDA dalam hal ini BAPPEDA membutuhkan partisipasi baik dari aparat desa maupun seluruh komponen masyarakat di Desa Jambu. Anggaran yang digunakan untuk proses pembangunan sendiri berasal dari APBD Kabupaten dan juga APBD desa Jambu.

2. Peran Pelaksanaan Pembangunan

Dalam proses pembangunan sanitasi di Desa Jambu BAPPEDA dalam fungsinya sebagai pelaksana pembangunan mengawasi jalannya pembangunan dalam hal fisik pembangunan maupun penyerapan anggarannya. Dalam proses pembangunan BAPPEDA juga harus memastikan bahwa pembangunan sanitasi yang berlangsung di desa Jambu sudah sesuai dengan tata ruang dan pembangunannya tidak mengganggu ekosistem lingkungan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan sanitasi di Desa Jambu antara lain menyankut pengawasan pembangunan, waktu pembangunan dan juga pengawasan terhadap anggaran pembangunan.

3. Peran Evaluasi Pembangunan

Hasil evaluasi pembangunan diterjemahkan dalam bentuk pelaporan. Laporan yang disusun meliputi laporan atas pelaksanaan pembangunan (berupa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati/LKPJ) maupun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Dari sisi pengendalian, BAPPEDA bertugas untuk menjamin agar suatu program/kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Bentuk pengendalian yang dilakukan oleh BAPPEDA saat ini yaitu berupa Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), yaitu berupa basis data-data pembangunan, dan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIP2D) yang berfungsi sebagai pengendali konsistensi antar dokumen perencanaan. Dengan menjalankan fungsi monitoring, evaluasi dan pelaporan, maka target/tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Selain data dan informasi yang akurat dan terkini, hasil kajian juga digunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan. BAPPEDA juga memiliki tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi penyusunan program penelitian, pelaksanaan penelitian, mempersiapkan program penelitian, pengkajian, koordinasi, identifikasi, dan sosialisasi hasil penelitian. Hasil pengkajian, penelitian dan pengembangan dapat dijadikan sebagai tindak lanjut pengambilan kebijakan di berbagai bidang.

BAPPEDA juga bertugas melakukan analisis dan pengolahan data hasil pelaksanaan rencana pembangunan serta menyusun statistik hasil-hasil pembangunan, yaitu berupa Indikator Makro Sosial Ekonomi Daerah dan Deskripsi Potensi Daerah. Dalam menjalankan fungsi ini, BAPPEDA bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Daerah. Sebagai konsekuensi dari akuntabilitas dan transparansi publik atas penyelenggaraan pembangunan daerah, BAPPEDA bertugas dalam kegiatan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan. Dalam hal ini, BAPPEDA wajib untuk men-disclosure dokumen-dokumen perencanaan maupun hasil kajian yang telah dilakukan agar mudah untuk diakses oleh publik/pihak yang berkepentingan.

2.4 Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sanitasi di desa Jambu

Sebagian besar anggota masyarakat sekarang memandang bahwa program pembangunan sanitasi memiliki manfaat dalam mengatasi masalah yang dialami oleh masyarakat khususnya

dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dari tanggapan positif yang di berikan oleh masyarakat di Desa Jambu dapat dilihat dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan.

1. Partisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan Sanitasi

Salah satunya yaitu partisipasi masyarakat dalam pembangunan sanitasi ditunjukkan dengan bentuk keikutsertaan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang pada hakikatnya adalah forum perencanaan pembangunan formal yang berusaha mempertemukan aspirasi masyarakat dari bawah dengan usulan program pembangunan dari instansi pemerintah. Pelaksanaan perencanaan pembangunann sanitasi di Desa Jambu yang melibatkan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD hingga pendanaan dalam APBD, memenuhi tiga prinsip berikut:

a. Prinsip Partisipatif (*Participative*)

Prinsip partisipatif menunjukkan bahwa rakyat atau masyarakat yang akan diuntungkan oleh (atau memperoleh manfaat dari) perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Dengan kata lain masyarakat menikmati faedah perencanaan bukan semata-mata dari hasil perencanaan, tetapi dari keikutsertaan dalam prosesnya.

b. Prinsip Kestinambungan (*Sustainable*)

Prinsip ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya terdiri dari pada suatu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan dan jangan sampai terjadi kemunduran. Juga diartikan perlunya evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaannya sehingga secara terus menerus dapat diadakan koreksi dan perbaikan selama perencanaan dijalankan.

c. Prinsip Keseluruhan (*Holistic*)

Prinsip ini menunjukkan bahwa masalah dalam perencanaan pelasaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi atau unsur tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. Dalam konsep tersebut/ unsur yang dikehendaki selain harus mencakup hal-hal di atas juga mengandung unsur yang dapat berkembang secara terbuka dan demokratis.

2. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pembangunan sanitasi yang diselenggarakan oleh pemerintah membutuhkan adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sanitasi oleh BAPPEDA dapat terjadi dalam beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh unit-unit pengelola pembangunan dalam hal ini adalah bidang pembangunan di kelurahan desa Jambu. Masyarakat turut mengawasi jalannya pembangunan sanitasi seperti perbaikan saluran irigasi dan pembangunan saluran air bersih, masyarakat turut mengawasi bahan-bahan atau material yang dibelanjakan apakah sesuai dengan dengan kebutuhan dan kualitasnya juga harus dipastikan baik.

Partisipasi masyarakat dapat terlihat ketika diadakan kegiatan kerjabakti dalam proses pembangunan sanitasi. Kegiatan pembangunan sanitasi ini dipandang sebagai suatu hal yang positif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan dalam kegiatan perbaikan irigasi dan pembangunan saluran air bersih juga diselenggarakan secara gotong royong. Dalam kegiatan gotong royong diadakan pembagian tugas antar warga. Pembagian tugas ini dimaksudkan agar kegiatan pembangunan sanitasi bisa lebih terarah dan mencapai hasil yang optimal. pendanaan dari kegiatan pembangunan/perbaiki sarana/fasilitas lingkungan hidup warga diambil dari sumbangan pemkot atau dana pemerintah namun warga di desa Jambu juga menggalang dana yang berasal dari swadaya warga yang diperuntukkan untuk menyempurnakan pembangunan dan menutup kekuarangan yang muncul dari proses pembangunan sanitasi.

3. Evaluasi Hasil Pembangunan Sanitasi

Evaluasi hasil pembangunan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh masyarakat dengan adanya evaluasi masyarakat bisa melihat apakah kinerja pembangunan terutama pembangunan sanitasi di Desa mereka sudah tepat sasaran dan bagaimanakah hasil atau dampak pembangunan bagi masyarakat di Desa Jambu. Dampak pembangunan tentu saja memberikan dampak yang bersifat positif dan ada pula yang bersifat negatif. karena itu dalam setiap pelaksanaan pembangunan harus melalui perencanaan yang matang sehingga dapat memberikan dampak yang positif terhadap individu, masyarakat setempat, dan masyarakat secara keseluruhan. Dampak positif adalah dampak yang dikahendaki atau yang direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan dalam masyarakat, sedangkan dampak yang tidak diinginkan adalah dampak yang tidak direncanakan dan tidak diinginkan oleh masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa dampak positif senantiasa beriringan dengan dampak

negatif. Dampak negatif inilah yang kemudian dikategorikan kedalam masalah sosial masyarakat. Oleh karena itu dalam pengendalian, dampak pembangunan yang negatif harus dimanimalisasi atau diperkecil. sehingga dampak sosial secara keseluruhan dapat berbentuk positif yang besar.

Dampak yang terjadi dengan adanya program pembangunan sanitasi meliputi dampak fisik dan dampak ekonomi. Hal ini dapat terlihat dari kemudahan mendapatkan air bersih sehingga masyarakat di desa Jambu terjamin kesehatannya dan lancarnya pengairan sawah. Dampak Sosial ekonomi Kegiatan Ekonomi yaitu diharapkan pendapatan petani akan meningkat dengan adanya perbaikan saluran irigasi.

2.5 PEMBAHASAN

1. Perencanaan yang dikombinasi dengan monitoring dan evaluasi dapat berperan penting dalam peningkatan efektifitas program dan kegiatan pembangunan. Perencanaan membantu untuk fokus pada hasil, sedangkan monitoring dan evaluasi membantu untuk mempelajari kesuksesan dan tantangan di masa lampau dan memberikan informasi untuk pembuatan keputusan sehingga periode saat ini dan masa yang akan datang akan menjadi lebih baik. Dengan demikian antara perencanaan, monitoring, dan evaluasi memiliki keterkaitan dan membentuk suatu siklus.
2. Tingkat efektivitas pelaksanaan Musrenbang perlu diperhatikan karena akan berpengaruh pada kualitas hasil perencanaan pembangunan pada tahun berikutnya sehingga dapat pula berpengaruh pada proses alokasi anggaran untuk usulan yang dibahas dalam Musrenbang tersebut. Selain itu Efektivitas pelaksanaan Musrenbang penting ditinjau agar pelaksanaan Musrenbang tidak hanya sebagai formalitas saja. Karena dewasa ini muncul kecenderungan bahwa pelaksanaan Musrenbang tidak dapat dijadikan tolok ukur perencanaan yang partisipatif dan mengutamakan transparansi (keterbukaan) sehingga output dari pelaksanaan Musrenbang tersebut tidak sesuai seperti yang diharapkan. Jika hal tersebut terjadi, maka akan berpengaruh terhadap besaran tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang yang menurun dan tidak sebanding dengan usulan serta alokasi anggaran program yang semestinya diperlukan dan diperuntukkan untuk masyarakat itu sendiri.
3. Kecamatan Jambu dengan kondisi masyarakatnya yang heterogen. Dalam proses pembangunan dibutuhkan partisipasi masyarakat agar hasil-hasil

pembangunan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tersebut

III. PENUTUP

4. Simpulan

- a. Musrenbang pada hakikatnya adalah forum perencanaan pembangunan formal yang berusaha mempertemukan aspirasi masyarakat dari bawah dengan usulan program pembangunan dari instansi pemerintah. Pelaksanaan perencanaan pembangunann sanitasi di Desa Jambu yang melibatkan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD hingga pendanaan dalam APBD.
- b. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang masih sangat kurang terutama di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan karena terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi publik. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih rendah sehingga kurang memahami pentingnya perencanaan pembangunan yang partisipatif.

